

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Putri Krisanti

putrikrisanti23.pk@gmail.com

Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of accountability, transparency, and publik participation in village finance management on publik wealth. The object was Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Sidoarjo District. Moreover, the instrument in the data collection technique used questionnaires. The questionnaires were distributed to the village apparatus and village publik as the respondents. The research was quantitative. Furthermore, the population was villagers of Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Sidoarjo District. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, with 98 respondents as the sample. Additionally, the data were both primary and secondary. The primary were in a form of a questionnaires which was directly filled out by the respondents. While the secondary data were in a form of an APBDes realization statement. The data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution) 26. The research result showed that accountability, transparency, and publik participation in village finance management had a positive and significant effect on the publik wealth at Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Sidoarjo District.

Keywords: accountability, transparency, publik participation, publik wealth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan ke perangkat desa dan masyarakat desa sebagai responden. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Karangbong. Proses pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dan diperoleh jumlah responden sebanyak 98 orang. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer berupa kuesioner yang diisi secara langsung oleh responden dan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 26 (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem desentralisasi, yaitu distribusi kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengelola urusan kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahannya sendiri, yaitu mengenai pengelolaan keuangan, dana desa, dan pembangunan desa.

Indonesia berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan ini berpusat pada pembangunan daerah maupun pembangunan desa. Peranan pemerintah dalam pembangunan desa cukup besar, karena kelancaran pembangunan di desa merupakan tujuan dari pemerintah pusat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan pembangunan dilakukan agar tidak terjadi dan laju pembangunan desa dan kota seimbang. Pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri dan harus mempertanggungjawabkan semuanya, termasuk pengelolaan keuangan desa.

Dalam proses pengelolaan keuangan desa dibutuhkan akuntansi pemerintahan yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan demi mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik. Perwujudan pengelolaan keuangan desa yang baik (*good governance*) pemerintah harus memenuhi tiga asas, yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas akuntabel, asas transparan, dan asas partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa, yang mencakup pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa untuk tahun mendatang. Pemerintah desa dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan aktivitas masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa untuk menghindari terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pemberian kewenangan dalam mengelola sumber daya publik, termasuk penggunaan dana desa yang telah diterima untuk kegiatan pemerintah desa. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi atas hal-hal yang perlu disampaikan mengenai kinerja pemerintahan desa dalam penggunaan sumber daya publik. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam semua aspek administrasi, dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat menyebabkan korupsi terhadap keuangan desa. Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui indikator pendidikan, kesehatan, pendapatan atau ekonomi (Sari, 2019).

Kesejahteraan masyarakat diharapkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat? (2) Apakah transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat? (3) Apakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk: (1) menganalisis pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat; (2) menganalisis pengaruh transparansi dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat; (3) menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Menurut Hernandez (2008) teori *stewardship* merupakan sikap dan perilaku yang memprioritaskan tujuan jangka panjang kelompok diatas kepentingan pribadi. Teori ini dibuat untuk memotivasi para *steward* agar bertindak sesuai keinginan *principal*. Davis dan

Donaldson (dalam Jefri, 2018) mengumpamakan bahwa teori *stewardship* membangun suatu hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Teori ini dapat diterapkan pada studi Akuntansi Sektor Publik seperti instansi pemerintahan dan organisasi nirlaba. Dalam sistem pemerintahan, pelaku *steward* adalah pemerintah yang harus bertindak sesuai dengan keinginan *principal*, yaitu masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan penyelenggaraan kegiatan yang ditujukan untuk kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban organisasi publik untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kepada orang yang berwenang meminta pertanggungjawaban tersebut (Renyowijoyo, 2013). Dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, menerangkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas akuntabel. Akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa atas pemakaian dana publik secara efisien, efektif, terbebas dari korupsi dan kolusi dengan menyediakan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang disajikan meliputi kegiatan operasional pemerintah mengenai proses pengelolaan keuangan desa yaitu penggunaan dana publik.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya mengenai sumber daya publik. Dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, menerangkan bahwa transparansi merupakan salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menerangkan bahwa transparansi adalah pemberian hak kepada masyarakat atas informasi keuangan yang terbuka dan jujur mengenai kegiatan operasional pemerintah desa terkait dengan penggunaan dana publik dan bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah desa, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif, sukarela, baik karena alasan-alasan dalam dirinya sendiri maupun dari luar diri sendiri dalam proses mendukung pencapaian tujuan atas keterlibatannya. Dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, menerangkan bahwa partisipasi merupakan salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan cara berpartisipasi langsung maupun tidak langsung (melalui lembaga perwakilan) dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat berguna sebagai jembatan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan akan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk membuat perencanaan berhasil (Rakhmawati *et al.*, 2020).

Pengelolaan Keuangan Desa

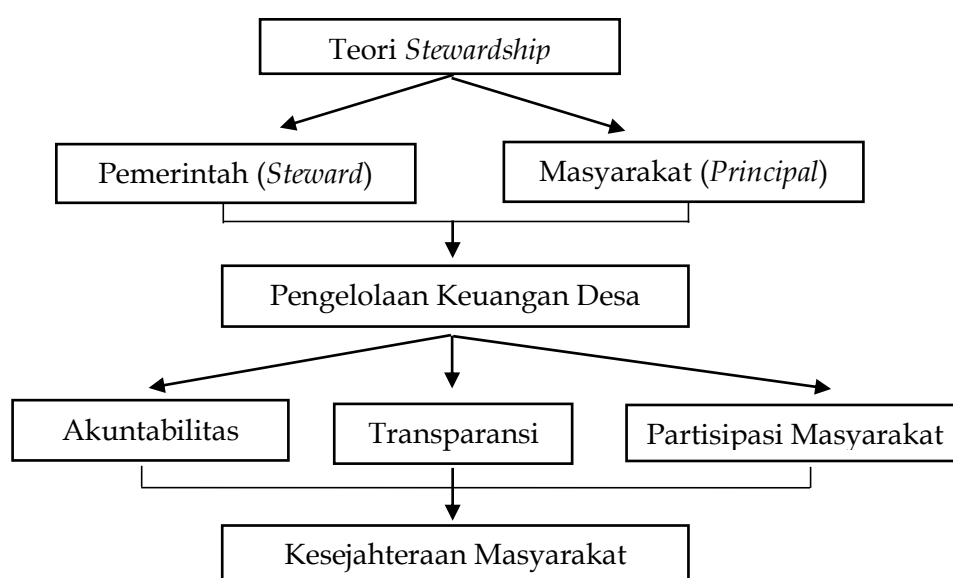
Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang bernilai moneter, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29, pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan seperti perencanaan pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial adalah suatu pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar warga dapat hidup layak, mengembangkan diri, dan menjalankan peran sosialnya. Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan terpenuhinya sandang pangan papan masyarakat, murahnya pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas, atau kondisi untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera (Sari, 2019). Indikator pengukuran kesejahteraan menurut Soetomo (2014) (dalam Wardani dan Utami, 2020) yaitu rasa aman, fasilitas umum, pendapatan, dan akses informasi.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan di atas maka dapat disusun rerangka pemikiran Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Penelitian Terdahulu

Ardelia (2022) menyatakan dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Taransparansi Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga penelitian yang dilakukan Sari (2018) juga menyatakan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sari (2019) menyatakan dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kletek Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) juga menyatakan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Nglebur Kecamatan Kedumpring Kabupaten Lamongan

menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kuswanti (2020) menyatakan dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi publik untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kepada orang yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pada penelitian Sari (2019) dan Kuswanti (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, ditunjukkan dengan adanya perencanaan alokasi dana desa dan adanya pemasangan spanduk berisi laporan keuangan desa dalam satu periode. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada masyarakat desa sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menduga terdapat pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₁: Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Transparan berarti asas terbuka kepada masyarakat atas informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa berkewajiban memberikan akses informasi atas apa yang telah dikerjakan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga penelitian yang dilakukan Sari (2019) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dengan adanya publikasi informasi dana desa dan kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah desa, masyarakat menyetujui transparansi pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menduga terdapat pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₂: Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Tindakan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan tahap evaluasi disebut sebagai partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berguna untuk mengetahui kondisi masyarakat desa, sehingga pemerintah dapat mengetahui upaya apa yang bisa menyejahterakan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian Ardalia (2022) dan Kuswanti (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh

positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan desa lebih maju.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menduga terdapat pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₃: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Objek Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian berlandaskan positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel yang telah ditentukan sebelumnya, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian, menganalisis data secara kuantitatif atau statistik, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kasual Komparatif (*Casual-Comparative Research*). Metode ini digunakan untuk menguji hubungan kausal antara dua variabel atau lebih. Populasi pada objek penelitian ini adalah masyarakat desa Masyarakat yang berdomisili di Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi di mana sampel tersebut dapat menggambarkan karakteristik dari suatu populasi dengan jumlah tertentu sebagai perwakilan dari populasi yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* atau pemilihan sampel menggunakan kriteria-kriteria tertentu dalam penelitian. Jadi jumlah sampel yang akan digunakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu terdiri dari 98 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh opini responden. Data sekunder pada penelitian ini digunakan sebagai pelengkap data primer agar lebih relevan dan akurat. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Pemerintahan Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, yaitu berupa Laporan Realisasi APBDes.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (APKD), Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD), dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (PMPKD). Sedangkan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Masyarakat (KM).

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat atas proses pengelolaan keuangan desa terkait dengan segala kegiatan operasional yang dilakukan pemerintah desa. Kurniawan (2019) menguraikan indikator yang digunakan dalam pengukuran akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu: (a) Pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, (b) Menilai Pertanggung jawaban, (c) Pelaporan. Jawaban dari responden berdasarkan indikator tersebut diukur menggunakan *skala likert* 1 sampai 5 poin.

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi (*openness*) adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai keuangan dan kegiatan operasional kepada masyarakat. Kurniawan (2019) menguraikan indikator yang digunakan dalam pengukuran transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu: (a) Keterbukaan keuangan, (b) Keterbukaan operasional, (c) Keterbukaan pengambilan keputusan. Jawaban dari responden berdasarkan indikator tersebut diukur menggunakan *skala likert* 1 sampai 5 poin.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi berkontribusi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kuswanti (2020) menguraikan indikator yang digunakan dalam pengukuran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu: (a) Keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, (b) Keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan, (c) Keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil, (d) Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil. Jawaban dari responden berdasarkan indikator tersebut diukur menggunakan *skala likert* 1 sampai 5 poin.

Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya indikator-indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Indikator pengukuran kesejahteraan menurut Sari (2019) adalah sebagai berikut: (a) Kesehatan masyarakat, (b) Pendidikan, (c) Ekonomi. Jawaban dari responden berdasarkan indikator tersebut diukur menggunakan *skala likert* 1 sampai 5 poin.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atas sekumpulan angka yang dapat diinterpretasikan dengan menggunakan rata-rata (mean), standar deviasi, *variance*, maximum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018).

Uji Validitas

Uji validitas adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengetahui validitas suatu kuesioner. Menurut Ghozali (2018), suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat diukur apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka uji validitas dikatakan valid, sebaliknya apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, uji validitas dikatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan instrumen pengukuran digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Ghozali (2018) menyatakan apabila jawaban yang diberikan responden konsisten maka data kuesioner tersebut dikatakan reliabel. Pengujian reliabilitas kuesioner menggunakan rumus *Cronbach Alpha* menyatakan apabila suatu variabel penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$. Apabila nilai *cronbach's alpha* $< 0,60$ maka variabel penelitian tersebut tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Dalam Ghozali (2018) terdapat dua cara untuk menguji

normalitas, yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov* (KS), jika nilai signifikan (Sig.) > *alpha* (0,05) maka nilai residual terstandarisasi memiliki distribusi normal dan uji normalitas P-Plot.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Tidak terjadinya korelasi antar variabel bebas mengartikan bahwa model regresi dapat dikatakan baik. Pengujian multikolonieritas dilihat dari nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dari masing-masing variabel (Ghozali, 2018). Apabila suatu model regresi menghasilkan nilai VIF ≤ 10 dan nilai TOL $\geq 0,10$ maka tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam Ghozali (2018) pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu menggunakan grafik *scatterplot* dan uji *Glesjer*. Pada grafik *scatterplot*, heteroskedastisitas dideteksi jika titik-titik membentuk pola serta tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Sedangkan uji *Glesjer* apabila nilai Sig > *alpha* (0,05) maka tidak ada kasus heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk mengukur kekuatan dan mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KM = \alpha + \beta_1APKD + \beta_2TPKD + \beta_3PMPKD + e$$

Keterangan:

KM	: Kesejahteraan Masyarakat
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi dari masing-masing variabel bebas
APKD	: Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa
TPKD	: Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa
PMPKD	: Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa
e	: Standar Error

Uji F

Menurut Ghozali (2018) uji F atau uji kelayakan model regresi. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi pada penelitian ini layak menjadi alat uji variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Kriteria pengujian kelayakan model sebagai berikut: (a) Apabila nilai signifikansi F < *alpha* 0,05 dikatakan variabel independen pada penelitian ini layak untuk menjelaskan variabel dependen, (b) Apabila nilai signifikansi F > *alpha* 0,05 dikatakan variabel independen pada penelitian ini tidak layak untuk menjelaskan variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2018) pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Nilai koefisien pada determinasi adalah antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R² mendekati satu, maka variabel independen memiliki kemampuan

yang kuat dalam menerangkan variasi dependennya. Jika nilai R² mendekati nol, maka kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi itu lemah.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam Ghozali (2018) pengujian ini menggunakan t hitung dan t tabel dengan cara dibandingkan, dan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% untuk nilai t. Ketentuan pengujian hipotesis sebagai berikut: (a) Apabila nilai signifikansi $t < 0,05$ maka hipotesis diterima, yang artinya bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikansi terhadap variabel dependen, (b) Apabila nilai signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak, yang artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikansi antar variabel independen terhadap dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada perangkat desa dan masyarakat desa di Desa Karangbong untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Dengan itu peneliti memiliki kriteria dalam menentukan sampel dengan deskripsi profil responden pada penelitian ini antara lain:

Tabel 1
Daftar Sampel

Sampel	Jumlah
Perangkat Desa	11
UMKM	4
Karang Taruna	11
Masyarakat Umum:	
Masyarakat desa yang datang ke kantor desa	29
Masyarakat RW 02	3
Masyarakat RW 03	2
Masyarakat RW 04	4
Masyarakat RW 05	5
Masyarakat RW 06	4
Masyarakat RW 07	4
Masyarakat RW 08	3
Masyarakat RW 09	14
Masyarakat RW 10	4
Total	98

Sumber: Data primer diolah, 2023

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden terhadap pertanyaan atau pernyataan kuesioner terhadap setiap variabel APKD, TPKD, PMPKD, dan KM. Berikut hasil pengujian statistik deskriptif:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
APKD	74	12,00	15,00	13,5676	1,30417
TPKD	74	15,00	20,00	18,0405	1,72364
PMPKD	74	27,00	35,00	30,3919	2,54180
KM	74	27,00	35,00	31,3784	3,03271
Valid N (listwise)	74				

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2 statistik deskriptif variabel penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Variabel Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (APKD) memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 15, memiliki nilai *mean* sebesar 13.56 dan nilai standar deviasinya sebesar 1.304, (2) Variabel Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD) memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 20, memiliki nilai *mean* sebesar 18.04 dan nilai standar deviasinya sebesar 1.723, (3) Variabel Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (PMPKD) memiliki nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 35, memiliki nilai *mean* sebesar 30.39 dan nilai standar deviasinya sebesar 2.541, (4) Variabel Kesejahteraan Masyarakat (KM) memiliki nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 35, memiliki nilai *mean* sebesar 31.37 dan nilai standar deviasinya sebesar 3.032.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji valid atau tidaknya suatu kuesioner. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian validitas:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel $\alpha = 5\%$	Kesimpulan
Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (APKD)	APKD_1	0,906	0,2287	Valid
	APKD_2	0,805	0,2287	Valid
	APKD_3	0,885	0,2287	Valid
Tranparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD)	TPKD_1	0,852	0,2287	Valid
	TPKD_2	0,819	0,2287	Valid
	TPKD_3	0,850	0,2287	Valid
	TPKD_4	0,833	0,2287	Valid
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (PMPKD)	PMPKD_1	0,678	0,2287	Valid
	PMPKD_2	0,669	0,2287	Valid
	PMPKD_3	0,455	0,2287	Valid
	PMPKD_4	0,635	0,2287	Valid
	PMPKD_5	0,644	0,2287	Valid
	PMPKD_6	0,650	0,2287	Valid
	PMPKD_7	0,528	0,2287	Valid
Kesejahteraan Masyarakat (KM)	KM_1	0,790	0,2287	Valid
	KM_2	0,844	0,2287	Valid
	KM_3	0,811	0,2287	Valid
	KM_4	0,791	0,2287	Valid
	KM_5	0,751	0,2287	Valid
	KM_6	0,847	0,2287	Valid
	KM_7	0,696	0,2287	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil tabel 3 dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0,2287), sehingga kesimpulannya bahwa seluruh pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi jawaban responden dari hasil kuesioner. Berikut ini adalah hasil dari pengujian reliabilitas:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of items	Kesimpulan
APKD	0.833	3	Reliabel
TPKD	0.859	4	Reliabel
PMPKD	0.664	7	Reliabel
KM	0.895	7	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil tabel 4 dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,6. Kesimpulannya bahwa seluruh pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau konsisten.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

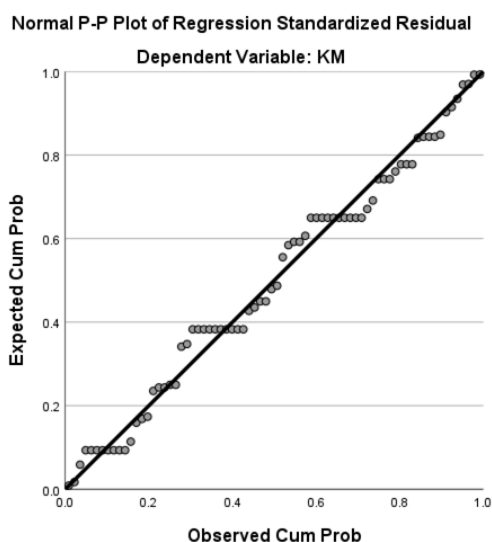
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		74
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,57425786
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,063
	Negative	-,083
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal ditunjukkan dari Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang berarti Asymp. Sig. > alpha (0,05).



Gambar 2
Uji Normal P-Plot

Sumber: Data primer diolah, 2023

Pada gambar 2 hasil uji normal P-Plot menunjukkan bahwa data terlihat terlihat berada disekitar garis diagonal maka dapat diindikasi bahwa residual data telah berdistribusi normal, sehingga data dapat dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Berikut ini merupakan hasil uji multikolonieritas:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolonieritas

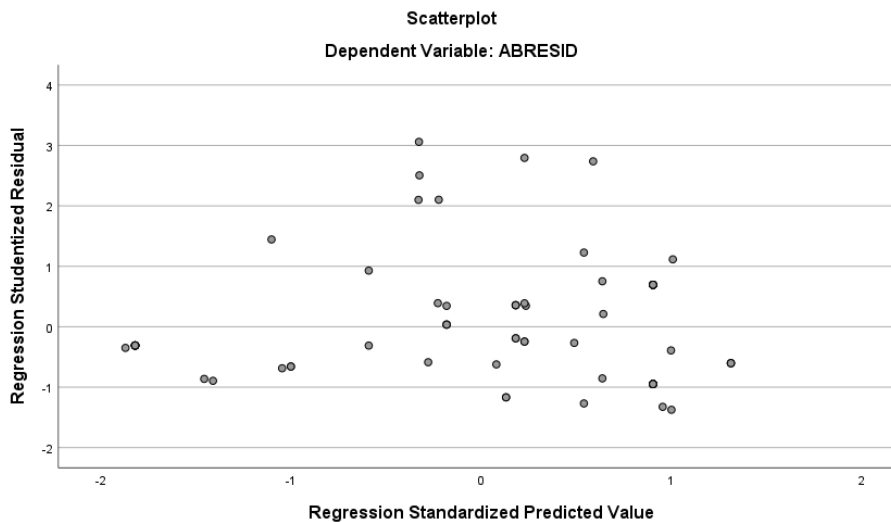
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
APKD	.266	3.761
TPKD	.217	4.619
PMPKD	.437	2.287

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa hasil dari suatu model regresi menghasilkan nilai TOL > 0,1 dan VIF ≤ 10 untuk semua variabel bebas (independen), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dapat dikatakan baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot
Sumber: Data primer diolah, 2023

Pada gambar 3 diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan titik-titik tersebar baik diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak terindikasi heteroskedastisitas pada model regresi. Hal tersebut juga di dukung melalui Uji *Glejser*. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan Uji *Glesjer*:

Tabel 7
Hasil Uji Glesjer

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.603	.494		3.246	.002
APKD	.005	.059	.019	.084	.934
TPKD	.000	.050	-.001	-.005	.996
PMPKD	-.040	.024	-.292	-1.683	.097

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7 hasil uji glesjer disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel dependen KM terhadap variabel independen APKD, TPKD, PMPKD karena dilihat dari nilai Sig > Alpha (0,05).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan pengaruh variabel bebas (independen) yaitu APKD, TPKD, dan PMPKD terhadap variabel terikat (dependen) yaitu KM. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.828	.851		-2.146	.035
APKD	.334	.102	.143	3.268	.002
TPKD	1.327	.086	.754	15.509	.000
PMPKD	.156	.041	.131	3.816	.000

a. Dependen Variabel: KM

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 8 hasil uji analisis linear berganda disimpulkan dalam model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KM = \alpha + \beta_1APKD + \beta_2TPKD + \beta_3PMPKD + e$$

$$KM = -1,828 + 0,334APKD + 1,327TPKD + 0,156PMPKD + e$$

Model persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa bernilai positif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi dapat dikatakan layak. Adapun ketentuannya jika nilai Sig uji F < 0,05 maka variabel independen layak untuk menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah hasil uji F:

Tabel 9
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	647,332	3	215,777	627,433	,000 ^b
	Residual	24,073	70	,344		
	Total	671,405	73			

a. Dependent Variabel: KM

b. Predictors: (Constant), PMPKD, APKD, TPKD

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 9 hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Sig yang diperoleh lebih kecil dari alpha 5% (0,05), maka keismpulannya model regresi dalam penelitian ini dikatakan layak digunakan sebagai alat penguji variabel independen terhadap dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.982 ^a	.964	.963	.58643

a. Predictors: (Constant), PMPKD, APKD, TPKD

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 10 hasil uji koefisien determinasi, Adjusted R Square diatas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R²) bahwa variabel independen yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat sebesar 0,963 atau 96,3%, sedangkan sisanya 3,7% dijelaskan oleh factor lain yang tidak termasuk dalam regresi tersebut.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Kriteria pengujian ini adalah jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima atau berpengaruh, sedangkan jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh. Berikut adalah hasil uji t:

Tabel 11
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.828	.851		-2.146	.035
	APKD	.334	.102	.143	3.268	.002
	TPKD	1.327	.086	.754	15.509	.000
	PMPKD	.156	.041	.131	3.816	.000

a. Dependent Variabel: KM

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 11 hasil uji t, maka hipotesis dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut: Pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan nilai koefisien B sebesar 0,334 dan nilai signifikansinya sebesar $0,002 \leq 0,05$ sehingga variabel akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh

positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka hipotesis pertama diterima. Pengaruh transparansi dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan nilai koefisien B sebesar 1,327 dan nilai signifikansinya $0,000 \leq 0,05$ sehingga variabel transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka hipotesis kedua diterima. Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan nilai koefisien B sebesar 0,156 dan nilai signifikansinya sebesar $0,000 \leq 0,05$ sehingga variabel partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka hipotesis ketiga diterima

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (APKD) memiliki nilai koefisien B sebesar 0,334 dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,002 \leq 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa akuntabilitas keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karangbong, maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya laporan realisasi APBDes sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang dipublikasikan di depan kantor desa menggunakan banner, sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan operasional pemerintah desa mengenai penggunaan keuangan desa. Pemerintah desa berhasil memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan pemerintah desa terkait dengan keuangan desa. Adanya kepatuhan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa, seperti korupsi. Hal tersebut ditunjukkan dengan jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan setuju. Penelitian ini memberikan hasil semakin tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, maka semakin meningkat juga kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari (2019) dan penelitian Kuswanti (2019) menyimpulkan bahwa adanya laporan pertanggungjawaban mengenai kondisi keuangan desa akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa atas proses pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa juga berhasil melaksanakan amanah dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pengaruh Tranparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (TPKD) memiliki nilai koefisien B sebesar 1,327 dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karangbong, maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya papan informasi mengenai jumlah pendapatan yang didapatkan dari pemerintah dan rincian kegiatan terkait penggunaan dana desa tahun 2023, agar masyarakat dapat mengetahui informasi keuangan atas kinerja pemerintah desa dalam penggunaan sumber daya publik. Usulan masyarakat dalam musyawarah yang melibatkan berbagai

masyarakat diperhatikan dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dari hasil kuesioner responden berpendapat bahwa adanya kemudahan akses informasi keuangan desa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Karangbong sudah transparan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawan (2019) dan Sari (2019) menyimpulkan bahwa publikasi mengenai informasi dana desa dan kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah desa sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan pemenuhan hak-hak publik untuk mengetahui penggunaan sumber daya publik yang telah di amanati kepada pemerintah desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa (PMPKD) memiliki nilai koefisien B sebesar 0,156 dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,005$ sehingga dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karangbong, maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dikatakan baik, ditunjukkan melalui jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan setuju. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardalia (2022) dan Kuswanti (2020) menyimpulkan bahwa adanya keterlibatan masyarakat dalam berkontribusi pada pembangunan desa membantu pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan jawaban responden dan hasil pengujian menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat uji hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (APKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (KM) di Desa Karangbong. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa akan memberikan dampak kepada masyarakat untuk percaya kepada pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditunjukkan dengan tersedianya laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dalam bentuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). (2) Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (TPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (KM) di Desa Karangbong, ditunjukkan dengan tersedianya papan informasi di depan kantor desa mengenai jumlah pendapatan yang diterima dari pemerintah dan rencana kegiatan terkait penggunaan dana desa tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa Karangbong sudah transparan dalam pengelolaan keuangan desa dan mampu memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa. (3) Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa (PMPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (KM). Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi demi kepentingan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dilakukan sesuai prosedur ilmiah, namun dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya berfokus pada satu desa atau satu tempat penelitian dan hanya menggunakan hasil kuesioner tanpa didukung wawancara. (2) Keterbatasan dalam penyebaran kuesioner, penyebaran kuesioner yang dilakukan kurang merata, sehingga hanya berfokus pada sudut pandang masyarakat. (3) Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen, yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan masih banyak variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen.

Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah Desa Karangbong hendaknya pemerintah Desa Karangbong menambahkan media infomasi selain papan informasi yang hanya tersedia di kantor desa, bisa dalam bentuk website agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi penggunaan dana untuk berbagai kegiatan desa dan keterbukaan pemerintah desa secara meluas dan mudah. (2) Bagi masyarakat, hendaknya masyarakat lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat akan lebih mengetahui kondisi mengenai perkembangan desa dan pemerintah desa dapat mengetahui kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. (3) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menambahkan metode wawancara agar dapat menghasilkan jawaban yang tidak bias dan lebih rinci penjelasannya terkait variabel yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardelia, S. N. 2022. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Empiris Pada Desa Sumorame). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Kesembilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hernandez, M. 2008. Promoting Stewardship Behavior In Organizations: A Leadership Model. *Journal of Business Ethics* 80(1): 121–128.
- Jefri, R. 2018. Teori Stewardship Dan Good Governance. *Economics Bosowa* 4(3): 14–28.
- Kurniawan, T. H. 2019. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Empiris Desa Nglebur Kecamatan Kedungpiring Kabupaten Lamongan). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Kuswanti, A. P. E. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Empiris Pada Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Rakhmawati, Intan, Y. Sriningsih., dan W. Suhaedi. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Media Bina Ilmiah* 14(9): 3243–3248.

- Renyowijoyo, M. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba*. Edisi Ketiga. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sari, A. N. 2018. Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7(5): 1-15.
- Sari, M. T. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8(12): 1-17.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Cetakan Kedua Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Wardani, D. K., dan R. R. P. Utami 2020. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 28(1): 35-50.